

RENJA

RENCANA KERJA

TAHUN 2024



DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Mr. Syarifuddin Prawira Negara KM 07 Tanjung Pati

Telp.(0752) 7754203 Fax (0752)7750136

E-mail : dishub50kota@gmail.com

Website : <http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/>

KATA PENGANTAR

Assamualaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 serta memperhatikan Prioritas Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional..

Renja selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 sehingga pada akhirnya diharapkan dapat tercapai proses perencanaan pembangunan transportasi yang baik.

Kami menyadari bahwa Renja ini masih belum sempurna, untuk itu saran dari pihak terkait sangat dihargai sebagai pembelajaran (*learning proses*) untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang. Akhir kata, Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 ini diharapkan dapat berkontribusi dan memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan semoga yang telah direncanakan ini dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tanjung Pati, Juli 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

M. DARMAWIJAYA, SH

NIP. 19690606 200003 1 006

Pembina Utama Muda (IV/c)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	2
I.3 Maksud dan Tujuan	3
I.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2016-2021	6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	34
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	64
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	65
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	65
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	65
3.3 Program dan Kegiatan	67
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	70
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	70
BAB V PENUTUP	103

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Dinas Perhubungan s/d Tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota	12
Tabel II.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	32
Tabel II.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota	39
Tabel III.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	66
Tabel III.2	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024	68
Tabel IV.1	Rencana Target Kinerja IKU Kepala Daerah dan OPD	70
Tabel IV.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026	71
Tabel IV.3	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen organisasi dan menjadi salah satu kewajiban nasional yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi publik/pemerintahan pada semua level organisasi. Kewajiban tersebut tertera dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) sebagai Rencana Kerja Tahunan. Pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), implementasi kebijakan tersebut adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD).

Renja merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan dokumen Renja yang disusun oleh OPD sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana strategis (Renstra) OPD untuk tahun rencana yang dimaksud. Renja OPD juga merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Renja mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena mencakup perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih tinggi seperti Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Renja berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga kualitas penyusunan Renja akan sangat menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat penggunaanya.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara

simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Proses penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 merupakan rangkaian dari penyusunan perencanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan serta pendanaannya yang dimulai dari identifikasi dan evaluasi program kegiatan tahun lalu dan program kegiatan yang akan dilaksanakan yang penyusunannya melibatkan aparatur Dinas Perhubungan guna memperoleh masukan-masukan mengenai program dan kegiatan yang akan direncanakan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD.

Renja OPD adalah perencanaan pelaksanaan kegiatan dan penganggaran oleh OPD yang berpedoman kepada RKPD. Program dan kegiatan yang dijabarkan dalam Renja OPD adalah seluruhnya dipedomani dari RKPD, agar target kinerja Daerah tercapai melalui pelaksanaan kegiatan di OPD.

Selanjutnya Renja Tahun 2024 nantinya sebagai tindak lanjut untuk penentuan KUA-PPAS dan akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005- 2025
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 – 2043;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.
14. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Perhubungan ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Perhubungan secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2024 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Perhubungan.
3. Menyediakan dokumen perencanaan sebagai suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan untuk tahun 2024.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Perhubungan ini ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Perhubungan.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan pada tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan Rencana Kerja (Renja), Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2021-2026, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja, Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Rencana Kerja dan Pagu Indikatif Dinas Perhubungan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju 2025

BAB V PENUTUP

Berisi uraian penutup berupa catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan 2021-2026

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 terhadap capaian Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk Tahun berjalan yaitu Tahun 2022 yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Perhubungan.

Pokok-pokok materi yang disajikan antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Persentase penggunaan anggaran tahun 2022, dari pagu anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.15.967.591.474 terealisasi sebesar Rp.15.171.139.593 atau 95.01%. Dari nilai realisasi tersebut terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 796.451.881 atau 4.99%.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian realisasi Renstra sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan;

Pada tahun 2022 terdapat beberapa Kegiatan yang tidak dapat terlaksana sesuai dengan target awal perencanaan. Hal ini disebabkan anggaran dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan prioritas.

Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

A. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

- ✓ Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

B. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja hasil/Keluaran yang direncanakan;

Pada tahun 2022, kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- ✓ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ✓ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD

C. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- ✓ Fasilitasi Kunjungan Tamu
- ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- ✓ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- E. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - ✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- F. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - ✓ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perasarana Jalan
 - ✓ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- G. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - ✓ Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
 - ✓ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Fasilitas Pendukung)
- H. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - ✓ Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - ✓ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
- I. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - ✓ Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - ✓ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - ✓ Koordinasi dan Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- J. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota
 - ✓ Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - ✓ Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota
- K. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - ✓ Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin

L. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

- ✓ Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
- M. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- N. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
- O. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Fasilitasi Pemenuhan persyaratan perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
- P. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Analis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Pada tahun 2022, kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :
- A. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- ✓ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terdapat permasalahan yang berarti, dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik terealisasi pada masing-masing kegiatan.
- Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana sehingga tidak dapat mencapai target kinerja. Berbagai faktor-faktor penyebab

tidak tercapainya target kinerja kegiatan Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya ketersediaan anggaran untuk penunjang pelaksanaan 2 Program, 17 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan pada tahun 2022, beberapa kegiatan tidak terlaksana dikarenakan mengutamakan kegiatan-kegiatan prioritas sehingga yang terlaksana adalah 2 Program, 16 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak terlaksana diantaranya :
 - A. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - ✓ Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
 - B. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Kurangnya pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :
- a) Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan pelayanan masyarakat pada umumnya
 - b) Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah berdampak pada laporan target kinerja dan laporan realisasi keuangan perangkat daerah,
 - c) Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.
 - d) Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan dimasa yang akan datang.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

- a) Untuk keberhasilan pencapaian program dan kegiatan dapat dilakukan pengusulan anggaran ke pemerintah agar mendapatkan dana tambahan ke daftar anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota,
- b) Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai,
- c) Kerjasama yang baik dari berbagai pihak internal maupun eksternal Perangkat Daerah sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai target dan sasaran sehingga meminimalisir ketidaksesuaian antara berbagai pihak,
- d) Dilakukan peningkatan kinerja agar tercapainya target kegiatan pada tahun yang akan datang.
- e) Dilakukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan melakukan pelatihan/diklat/pendidikan agar terampil dalam melaksanakan tugas demi lancarnya program yang telah direncanakan,

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun 2022, maka Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2022 disajikan pada Tabel II.1 sebagai berikut:

Tabel II. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	01				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	85%	85%	85%	100%	85%	85%	100%
2	15	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	0	0	0		2	2	20%
2	15	01	2	01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5	0	0	0		1	1	20%
2	15	01	2	01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5	0	0	0		1	1	20%
2	15	01	2	01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5	0	0	0		1	1	20%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat at Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	01	2	01	05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5	0	0	0		1	1	20%
2	15	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	30	5	5	5	100%	5	15	50%
2	15	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	22	2	4	4	100%	4	10	45%
2	15	01	2	02		Administrasi Keuangan	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	242	1	49	49	100%	46	96	40%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72	12	12	12	100%	12	36	50%
2	15	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	1	1	1	100%	1	3	50%
2	15	1	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	80	0	0	0		16	16	20%
2	15	1	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	0	0	0		1	1	20%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat at Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	01	2	03		Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100%	0%	0%	0%		100%	100%	100%
2	15	1	2	03	01	Penyusunan Perancangan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	0	0	0		1	1	20%
2	15	1	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	0	0	0		1	1	20%
2	15	1	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10	0	0	0		2	2	20%
2	15	1	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10	0	0	0		2	2	20%
2	15	01	2	04		Adminitrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi pendapatan daerah	100%	0%	0%	0%		100%	100%	100%
2	15	1	2	04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	20	0	0	0		4	4	20%
2	15	1	2	04	02	Analisis dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	20	0	0	0		4	4	20%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	1	2	04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	20	0	0	0		4	4	20%
2	15	1	2	04	05	Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	60	0	0	0		12	12	20%
2	15	1	2	04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	60	0	0	0		12	12	20%
2	15	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	0%	0%	0%		100%	100%	100%
2	15	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	0	0	0		0	0	0%
2	15	01	2	05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	25	0	0	0		5	5	20%
2	15	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	72	0	0	0		140	140	194%
2	15	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat at Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36	12	6	6	100%	6	24	67%
2	15	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17	12	17	17	100%	17	46	271%
2	15	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	160	12	41	41	100%	41	94	59%
2	15	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	482.914	12	33.333	58.563	176%	80.200	138.775	29%
2	15	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6379	12	624	624	100%	1100	1.736	27%
2	15	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3174	12	1075	1075	100%	600	1.687	53%
2	15	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144	12	24	24	100%	24	60	42%
2	15	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	0%	0%	0%		100%	100%	100%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat at Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11	0	0	0		0	0	0%
2	15	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	151	0	0	0		24	24	16%
2	15	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	109	0	0	0		24	24	22%
2	15	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.917	12	465	465	100%	500	977	33%
2	15	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	23.379.032	12	51.000	51.000	100%	3.630.000	3.681.012	16%
2	15	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18	12	3	3	100%	3	18	100%
2	15	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108	12	0	0		18	30	28%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat at Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66	12	10	10	100%	11	33	50%
2	15	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	0	1	1	100%	1	2	40%
2	15	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	0	0	0		2	2	29%
2	15	02				Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	2,42	2,55	2,97	2,38	80%	2,82	2,82	117%
2	15	02				Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,50	N/A	0,53	0,23	43%	0,52	0,52	104%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	02	2	01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pelaksanaan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%	0%	0%	0%		100%	100%	100%
2	15	02	2	01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2	0	0	0		1	1	50%
2	15	02	2	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan yang berfungsi dengan baik	75%	55%	62%	101%	163%	65%	65%	87%
2	15	02	2	02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	0	0	0	0		0	0	
2	15	02	2	02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	101.229	25	130	133	102%	0	158	0%
2	15	02	2	02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5	0	0	0		0	0	0%
2	15	02	2	02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3.396	0	0	0		0	0	0%
2	15	02	2	03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase tercapainya dan tertib pengelolaan terminal	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat at Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	02	2	03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1	1	0	0		0	1	100%
2	15	02	2	03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	0	0	0	0		0	0	
2	15	02	2	03	03	Pengembangan sarana dan prasarana terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	0	0	0	0		0	0	
2	15	02	2	03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	30	0	2	2	100%	0	2	7%
2	15	02	2	03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50	0	0	0		10	10	20%
2	15	02	2	04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase tercapainya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	02	2	04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	0	1	1	100%	1%	1	101%
2	15	02	2	04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	5	5	100%	5	10	
2	15	02	2	05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)	95%	95%	89%	99%	111%	93%	93%	98%
2	15	02	2	05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2	1	0	0		0	1	50%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat at Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	02	2	05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	36	0	0	0		0	0	0%
2	15	02	2	05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	150	0	0	0		0	0	0%
2	15	02	2	05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	52.932	4.150	2.730	2.730	100%	9200	16.080	30%
2	15	02	2	05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.300	0	0	0		0	0	0%
2	15	02	2	05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1	0	0	0		0	0	0%
2	15	02	2	05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	119	9	29	9	31%	9	27	23%
2	15	02	2	05	08	Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	15	0	3	3	100%	3	6	40%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat at Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	02	2	05	09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	15	0	0	0		3	3	20%
2	15	02	2	05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	0	0		5	5	
2	15	02	2	06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	02	2	06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0	0	0	0		0	0	
2	15	02	2	06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	0	0	0	0		0	0	
2	15	02	2	06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0	1	1	1	100%	1	3	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	02	2	06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.321	100	150	150	100%	207	457	35%
2	15	02	2	06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	61	1	0	0		10	11	18%
2	15	02	2	07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	02	2	07	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	0	0	0	0		0	0	
2	15	02	2	07	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	33	0	0	0		6	6	18%
2	15	02	2	07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	58	0	8	1	13%	12	13	22%
2	15	02	2	07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	58	0	0	0		12	12	21%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	02	2	08		Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang terlaksana	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	02	2	08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10	0	0	0		2	2	20%
2	15	02	2	08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	58	0	0	0		12	12	21%
2	15	02	2	08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	38	0	0	0		6	6	16%
2	15	02	2	08	04	Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	170	0	0	0		23	23	14%
2	15	02	2	08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	70	0	4	1	25%	12	13	19%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat at Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	02	2	09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Persentase tertibnya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	02	2	09	01	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan /atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	75	0	15	15	100%	15	30	40%
2	15	02	2	10		Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	Persentase terlaksananya Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	100%	0%	0%	0%		100%	100%	100%
2	15	02	2	10	01	Perumusan Kebijakan Penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan-kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	15	0	0	0		3	3	20%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	02	2	10	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	230	0	0	0		37	37	16%
2	15	02	2	11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	0%	0%	0%		100%	100%	100%
2	15	02	2	11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8	0	0	0		4	4	50%
2	15	02	2	12		Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase terlaksana penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam satu daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	02	2	12	01	Perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	4	2	2	100%	0	6	24%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	02	2	12	02	Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	7.200	0	0	0		1200	1.200	17%
2	15	02	2	14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase tertibnya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	02	2	14	01	Fasilitas Pemenuhan persyaratan perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	1	1	1	100%	1	3	300%

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat at Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2023	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	15	02	2	14	02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	1	1	100%	1	3	300%
2	15	02	2	16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penetapan tarif Kelas Ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	1	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	02	2	16	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kota Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	0	1	1	100%	0	1	50%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Untuk kinerja pelayanan di bidang penyelenggaraan transportasi, pemerintah daerah belum mempunyai legalitas yang mendukung atau belum diaturnya petunjuk pelaksana atas perubahan beberapa peraturan perundangan di tingkat nasional yang mengatur tentang urusan Perhubungan. Belum adanya standar tentang layanan transportasi yang mengatur tentang tata cara berlalu lintas, maka dalam menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, menggunakan tolak ukur dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Selanjutnya kajian terhadap capaian kinerja pelayanan disajikan dalam bentuk tabel dalam Tabel II.

2

Tabel II. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPP / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	-	-	0,53	0,52	0,51	0,51	0,23	0,52	0,51	0,51	
2	Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 kendaraan	-	-	2,97	2,82	2,68	2,55	2,38	2,82	2,68	2,55	
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	-	-	79,57	79,58	79,59	79,6	N/A	79,58	79,59	79,6	
4	Persentase penurunan Angka Kecelakaan (%)	-	-	1%	2%	3%	4%	12%	2%	3%	4%	
5	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan yang berfungsi dengan baik (%)	-	-	62%	65%	70%	72%	101%	65%	70%	72%	
6	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)	-	-	93	94	94,5	94,75	99,36	94	94,5	94,75	
7	Aspek penyebab kemacetan yang teratasi	-	-	60	62	64	66	40	62	64	66	
8	Persentase Realisasi Keuangan Dinas Perhubungan (%)	-	-	97,75	97,8	98	98,2	95,01	97,8	98	98,2	
9	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	85	85	86	87	N/A	85	86	87	
10	Jumlah arus penumpang angkutan umum	-	-	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000	N/A	4.300.000	4.400.000	4.500.000	

No	Indikator	SPP / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Rasio ijin trayek	-	-	2,94	2,95	2,96	2,97	4,11	2,95	2,96	2,97	
12	Jumlah uji KIR angkutan umum	-	-	5976	6069	6162	6237	5003	6069	6162	6237	
13	Jumlah Pelabuhan Terminal Penumpang dan Terminal Barang	-	-	4	4	4	4	0	4	4	4	
14	Persentase layanan angkutan darat	-	-	0,000%	0,000%	0,010%	2%	N/A	0,000%	0,010%	2%	
15	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	-	-	89%	91%	93%	93%	99%	91%	93%	93%	
16	Pemasangan Rambu-rambu	-	-	60%	61%	62%	63%	100%	61%	62%	63%	
17	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	-	-	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	
18	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	-	-	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000	N/A	4.300.000	4.400.000	4.500.000	
19	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	-	-	130.000	135.000	140.000	145.000	0	135.000	140.000	145.000	
20	Rasio Konektivitas Kota	-	-	46	47	48	49	80	47	48	49	
21	V/C Ratio di jalan Kota	-	-	0,53	0,52	0,51	0,51	0,23	0,52	0,51	0,51	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas dengan Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas pada titik rawan kemacetan dan kecelakaan, diantaranya persimpangan, pasar-pasar dan sekolah pada saat jam sibuk.
- b. Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dengan Penyediaan perasarana dan perlengkapan jalan diantaranya pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU), Pengadaan rambu, Pengadaan Marka dan lainnya
- c. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Lalu Lintas dengan Sosialisasi tata cara berlalu lintas bagi pengguna jalan hal ini dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran pengguna jalan sehingga terwujudnya kelancaran dan keselamatan berlalu lintas.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas melaksanakan wewenang di Bidang Perhubungan dengan fungsi :

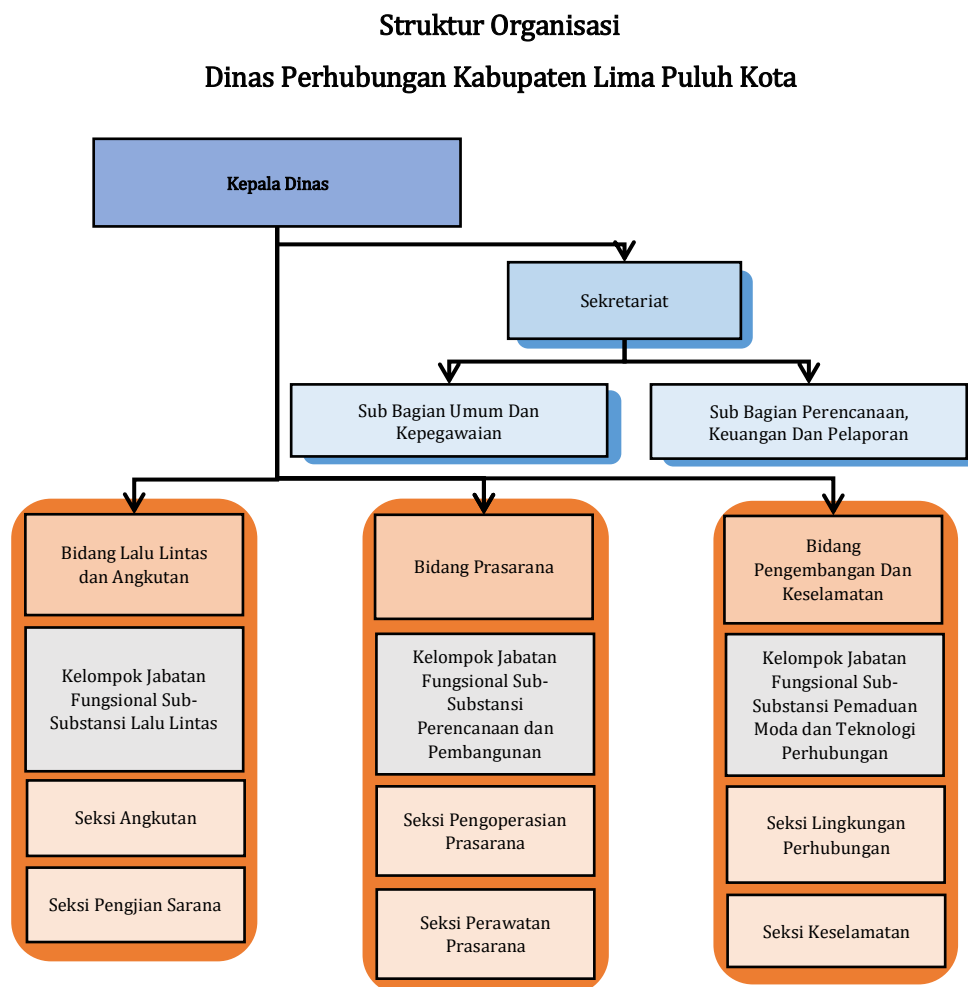
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari:

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan;
 3. Seksi Pengujian Sarana.
- d) Bidang Prasarana, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
 2. Seksi Pengoperasian Prasarana;

3. Seksi Perawatan Prasarana.
- e) Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawahi:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan dan Keselamatan;
 2. Seksi Pemanduan Moda Dan Teknologi Perhubungan;
 3. Seksi Keselamatan.
- f) Unit Pelaksana Teknis Daerah

Untuk mengetahui Lebih jelas tentang Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada struktur dibawah ini :



Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya, Dinas Perhubungan dihadapkan pada beberapa permasalahan dan hambatan, yaitu:

1. Belum adanya Terminal Tipe C di kawasan IKK Sarilamak.
2. Belum adanya kendaraan khusus pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) yaitu Skylift

3. Kurangnya tingkat keselamatan sekolah dikawasan IKK Sarilamak sehingga diperlukannya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
4. Pertumbuhan kendaraan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan jalan
5. Rendahnya wawasan, pemahaman dan kesadaran masyarakat/pengguna jalan terhadap keselamatan berlalu lintas
6. Keterbatasan ruang parkir sehingga kendaraan menggunakan badan jalan yang mengurangi kapasitas jalan
7. Belum adanya kebijakan pemerintah dalam mengalihkan penetapan status jalan Nasional sehingga menyebabkan Kawasan Perkotaan (IKK) Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum tertata dan terkelola dengan baik
8. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana LLAJ maupun perlengkapan jalan.
9. Belum memadainya angkutan umum yang melayani daerah-daerah terisolir pada wilayah Kabupaten.
10. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang perhubungan masih terbatas
11. Rendahnya kemampuan profesional aparatur di bidang perhubungan;
12. Tidak meratanya beban kerja;
13. Lemahnya pelaksanaan sistem monitoring dan pengendalian;
14. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi;

Dalam capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan yang menjadi salah satu penunjang kesuksesan Visi dan Misi Kepala Daerah yaitu pada misi 5 yaitu “Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik”, dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yaitu :

1. Pelayanan transportasi yang belum optimal, terpadu dan terintegrasi
2. Pelaksanaan sistem dan mekanisme transportasi yang belum efektif dan efisien

Analisis terhadap lingkungan eksternal Dinas Perhubungan memperlihatkan tantangan dan peluang sebagai berikut:

1. Tantangan
 - a. Belum adanya rencana umum transportasi perkotaan yang baik;
 - b. Adanya tuntutan perencanaan bidang perhubungan yang berkualitas;

- c. Adanya kekayaan potensi bidang perhubungan yang belum tergarap secara maksimal
- 2. Peluang
 - a. Letak geografis yang strategis;
 - b. Adanya dukungan dari Kepala Daerah;
 - c. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
 - d. Adanya potensi hubungan mutualisme dengan Pemerintah pusat, Provinsi dan *Stake holder* lainnya.

Dalam menyikapi isu-isu penting, rekomendasi dan catatan yang harus ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan diantaranya sebagai berikut :

1. Merencanakan Pembangunan Terminal Tipe C di kawasan IKK Sarilamak
2. Merencanakan Zona Selamat Sekolah di kawasan IKK Sarilamak
3. Merencanakan Pengadaan Kendaraan Pemeliharaan PJU (Skylift)
4. Meningkatkan jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
5. Mengoptimalkan penyusunan kebijakan daerah dan kebijakan pemerintah
6. Membangun sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
7. Melakukan pendataan dan penataan fasilitas dan rekayasa lalu lintas
8. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan berlalu lintas dan parkir
9. Memiliki data yang *valid* dan *up to date*

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Perhubungan dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD.

Pada akhirnya, Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati. Disebabkan karena Rancangan Awal RKPD kadang tidak sesuai dengan Hasil Analisis Kebutuhan OPD, dimana analisis kebutuhan membutuhkan anggaran yang lebih besar dari pagu RKPD.

Riview terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dari hasil Riview Rancangan Awal RKPD diperoleh temuan-temuan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD sebagai berikut :

1. Rancangan awal RKPD belum mengakomodir seluruh kegiatan dari Hasil analisis kebutuhan Dinas Perhubungan. Hal ini disebabkan karena adanya masukan serta tambahan kegiatan yang harus diakomodir oleh Dinas Perhubungan pada Tahun 2024.
2. Adanya masukan serta saran pada kegiatan dan sub kegiatan menyebabkan adanya pengurangan dan penambahan sehingga berubahnya pagu anggaran yang dibutuhkan Dinas Perhubungan untuk menjalankan kegiatan tersebut pada tahun 2024.
3. Adanya Perubahan Nomenklatur Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga terdapat beberapa perubahan Sub Kegiatan.

Berikut adalah Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 yang ditampilkan dalam Tabel II. 3

Tabel II. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				40.180.138.659	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				12.919.376.741	
2	15	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	17.352.968.659	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	12.087.459.091	
2	15	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	328.575.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	0%	0	
2	15	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2 Dokumen	66.550.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	-	
2	15	01	2	01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	42.350.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	-	
2	15	01	2	01	03	Koordinasi dan penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	34.848.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	-	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	01	2	01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	71.390.000	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	-	
2	15	01	2	01	05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	24.200.000	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	-	
2	15	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5 Laporan	55.357.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	-	
2	15	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 Laporan	33.880.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	-	
2	15	01	2	02		Administrasi Keuangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	5.040.068.078	Administrasi Keuangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	3.704.033.511	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	46 orang/bulan	4.856.628.448	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	3.687.636.011	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan
2	15	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12 Dokumen	113.577.860	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	16.397.500	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan
2	15	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan	24.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	-	
2	15	1	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan / Semesteran SKPD (Laporan)	16 Laporan	22.990.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD	0 Laporan	-	
2	15	1	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Dokumen	22.671.770	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	-	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	01	2	03		Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100%	218.163.000	Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	0%	0	
2	15	1	2	03	01	Penyusunan Perancangan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Baarang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	42.688.800	Penyusunan Perancangan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	-	
2	15	1	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	53.845.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	-	
2	15	1	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2 Laporan	35.937.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	-	
2	15	1	2	03	06	Penatausahaa n Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barng Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2 Laporan	85.692.200	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	-	
2	15	01	2	04		Adminitrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi pendapatan daerah	100%	98.691.472	Adminitrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi pendapatan daerah	0%	0	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	1	2	04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	4 Dokumen	23.119.470	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Dokumen	-	
2	15	1	2	04	02	Analisis dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	4 Dokumen	1.890.383	Analisis dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	0 Dokumen	-	
2	15	1	2	04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	4 Dokumen	937.145	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	0 Dokumen	-	
2	15	1	2	04	05	Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	12 Dokumen	1.237.951	Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	0 Laporan	-	
2	15	1	2	04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	12 Dokumen	71.506.523	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Dokumen	-	
2	15	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	1.331.642.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	0	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya guna untuk meningkatkan disiplin aparatur	231 stel	685.392.500	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0 Paket	-	
2	15	01	2	05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	5 Orang	2.250.000	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	0 Orang	-	
2	15	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	644.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	-	
2	15	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100%	496.127.709	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100%	421.756.400	
2	15	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.114.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.050.000	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan
2	15	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.100.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	17.259.700	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan
2	15	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	4 Paket	110.587.950	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	4 Paket	83.065.600	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
								Disediakan					Disediakan			Perhubungan
2	15	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Penggandaan yang disediakan	12 Paket	76.715.210	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Penggandaan yang disediakan	12 Paket	62.087.100	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan
2	15	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	7.355.469	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	-	
2	15	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	99.825.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	49.250.000	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan
2	15	01	2	06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	185.430.080	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.044.000	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan
2	15	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	567.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	28.500.000	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	-	
2	15	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	170.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	-	
2	15	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	194.500.000	Pengadaan Mebel	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-	
2	15	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	203.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	28.500.000	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan
2	15	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	8.431.267.900	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	7.519.240.000	
2	15	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Laporan	6.050.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.000.000	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	7.986.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.661.500.000	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan
2	15	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Laporan)	12 Laporan	22.784.300	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.240.000	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan
2	15	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Umum yang di sediakan (Laporan)	12 Laporan	416.433.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	847.500.000	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan
2	15	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100%	840.932.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100%	413.929.180	
2	15	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan terbayarnya pajak dan Perizinannya (Unit)	11 Kendaraan	245.932.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	378.929.180	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Lapangan										
2	15	01	2	09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	495.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-	
2	15	01	2	09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	35.000.000	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan
2	15	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	2.68	22.827.170.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	2.68	831.917.650	
							Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0.51			Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0.51		
2	15	02	02	01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tercapainya pelaksanaan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0%	0	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tercapainya pelaksanaan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%	66.132.500	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	02	2	01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/K ota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	66.132.500	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan dan IKK Outcome Urusan Perhubungan
2	15	02	2	01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/K ota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	0	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0 Dokumen	-	
2	15	02	2	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/K ota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan yang berfungsi dengan baik	70%	14.102.666.516	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan yang berfungsi dengan baik	70%	126.400.000	
2	15	02	2	02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/K ota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	0%		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	0 Unit	-	
2	15	02	2	02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/K ota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	500 Unit	11.559.026.516	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Unit	-	
2	15	02	2	02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	1 Unit	40.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0 Unit	-	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	02	2	02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	500 Unit	2.503.640.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	250 Unit	126.400.000	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan
2	15	02	2	03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Persentase tercapainya dan tertib pengelolaan terminal	100%	1.760.500.000	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Persentase tercapainya dan tertib pengelolaan terminal	0%	0	
2	15	02	2	03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun (Unit)	1 Unit	450.000.000	Pembangunan Gedung Terminal	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	0 Unit	-	
2	15	02	2	03	03	Pengembangan sarana dan prasarana terminal	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan Pengembangan (Unit)	1 Unit	512.500.000	Pengembangan sarana dan prasarana terminal	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan Jumlah sarana dan prasarana yang dikembangkan (unit)	0 Unit	-	
2	15	02	2	03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	10 Unit	698.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	-	
2	15	02	2	03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	10 Orang	100.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Orang	-	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	02	2	04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tercapainya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	78.500.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tercapainya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	33.600.000	
2	15	02	2	04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	10 Dokumen	43.500.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	33.600.000	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	02	2	04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	5 Laporan	35.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Laporan	-	
2	15	02	2	05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)	95%	910.080.000	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)	95%	179.980.200	
2	15	02	2	05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	19.000.000	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan dan IKK Outcome Urusan Perhubungan
2	15	02	2	05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	6 Orang	243.480.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Orang	-	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	02	2	05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar (Unit)	0 Unit	0	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	0 Unit	-	
2	15	02	2	05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	9500 Dokumen	283.200.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	84.000.000	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan dan IKK Outcome Urusan Perhubungan
2	15	02	2	05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	1 Laporan	184.000.000	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0 Laporan	-	
2	15	02	2	05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	9 Unit	54.400.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	76.980.200	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan dan IKK Outcome Urusan Perhubungan

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	02	2	05	08	Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	3 Laporan	80.000.000	Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0 Laporan	-	
2	15	02	2	05	09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	3 Laporan	23.000.000	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0 Laporan	-	
2	15	02	2	05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	1 Laporan	42.000.000	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0 Laporan	-	
2	15	02	2	06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tercapainya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	100%	4.534.691.484	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tercapainya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	100%	261.950.800	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	02	2	06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota (Laporan)	1 Laporan	3.965.448.284	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provins	1 Laporan	220.000.000	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan
2	15	02	2	06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / Kota (Laporan)	12 Laporan	278.214.000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	41.950.800	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan
2	15	02	2	06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota (Laporan)	2 Laporan	291.029.200	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0 Laporan	-	
2	15	02	2	07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tercapainya pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	285.073.000	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tercapainya pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	30.268.000	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	02	2	07	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Orang	61.450.000	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Orang	-	
2	15	02	2	07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12 Laporan	114.438.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan	30.268.000	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan
2	15	02	2	07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	12 Laporan	109.185.000	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	0 Laporan	-	
2	15	02	2	08		Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang terlaksana	100%	581.808.000	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang terlaksana	100%	53.587.500	
2	15	02	2	08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2 Orang	80.000.000	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Orang	-	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	02	2	08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	12 Laporan	138.900.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	0 Laporan	-	
2	15	02	2	08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)	8 Laporan	175.000.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	0 Laporan	-	
2	15	02	2	08	04	Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)	1 Laporan	82.500.000	Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	53.587.500	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKU Perhubungan

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	02	2	08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	12 Laporan	105.408.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	0 Laporan	-	
2	15	02	2	09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertibnya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	100%	30.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertibnya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	0%	0	
2	15	02	2	09	01	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan /atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota (Unit)	1 Unit	30.000.000	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan /atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Unit	-	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	02	2	10		Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase terlaksananya Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	100%	94.656.000	Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase terlaksananya Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	100%	56.317.500	
2	15	02	2	10	01	Perumusan Kebijakan Penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan-kewenangan kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten / Kota (Dokumen)	3 Dokumen	45.000.000	Perumusan Kebijakan Penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan-kewenangan kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	56.317.500	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKK Outcome Urusan Perhubungan

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	02	2	10	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 Dokumen	49.656.000	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	-	
2	15	02	2	11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase terlaksanannya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0%	0	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase terlaksanannya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	15.646.150	
2	15	02	2	11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota (Dokumen)	0	0	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	-	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	02	2	11	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.646.150	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKK Outcome Urusan Perhubungan
2	15	02	2	12		Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase terlaksana penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam satu daerah kabupaten/kota	100%	278.195.000	Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase terlaksana penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam satu daerah kabupaten/kota	0%	0	
2	15	02	2	12	01	Perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	200.000.000	Perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	-	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	02	2	12	02	Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencanan umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/ko ta	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan dan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 Dokumen	78.195.000	Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencanan umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	-	
2	15	02	2	14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertibnya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	100%	171.000.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertibnya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	100%	8.035.000	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	02	2	14	01	Fasilitas Pemenuhan persyaratan perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Laporan)	1 Laporan	150.000.000	Fasilitas Pemenuhan persyaratan perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Laporan	8.035.000	Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian IKK Outcome Urusan Perhubungan
2	15	02	2	14	02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek kewenangan Kabupaten / Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota (Laporan)	1 Laporan	21.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek kewenangan Kabupaten / Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Laporan	-	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja OPD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari pokok pikiran pimpinan daerah dan aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Perhubungan berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang.

Pada tahun 2024 dikarenakan keterbatasan Pagu Indikatif maka tidak adanya program maupun kegiatan dari pokok pikiran dan aspirasi masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan tujuan dan sasaran, prioritas serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dipergunakan sebagai pedoman pembangunan nasional di bidang perhubungan. Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat agenda pembangunan nasional dalam naskah teknokratik antara lain “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”, Program prioritas yang harus dicapai adalah Infrastruktur Pelayanan Dasar dengan kegiatan prioritas Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Oleh karena itu maka disinkronkan dalam perencanaan-perencanaan yang diarahkan agar menjadi skala prioritas.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang berpedoman pada pencapaian visi misi Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu dengan visi :

**“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam
Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah**

Keterkaitan misi Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada Misi 4 yaitu **“Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya”** dan Misi 5 yaitu **“Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.**

Maka, berdasarkan misi Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Perhubungan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin di capai oleh Dinas Perhubungan adalah sesuai penjabaran Visi dan Misi dan juga merupakan cermin dari adanya peningkatan kinerja aparatur secara menyeluruh untuk semua pegawai negeri sipil dan pegawai harian di lingkungan Dinas Perhubungan dan Dinas Perhubungan yang berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan.

Adapun tujuan Dinas Perhubungan adalah:

- a. Meningkatkan Kualitas Jalan
- b. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Berdasarkan penjelasan diatas maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021-2026 dan indikator kinerja sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- a. Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan indikator :
 - ✓ Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan
 - ✓ Indeks Kelancaran Lalu Lintas
- b. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan dengan indikator Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Ringkasan Tujuan dan Sasaran disajikan dalam Tabel III.1 sebagai berikut :

Tabel III. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
1	Meningkatkan Kualitas Jalan		1. Indeks Kelancaran Lalu Lintas
			2. Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan
		Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan	1. Indeks Kelancaran Lalu Lintas
			2. Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan
2	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan Dinas Perhubungan untuk Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun 2024 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Dinas Perhubungan tahun 2021-2026.

Renja Dinas Perhubungan dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu program, kegiatan, dan sub kegiatan. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 2 program, 16 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 5 kegiatan dan 15 Sub Kegiatan yaitu:
 - a. Administrasi Keuangan, dengan 2 Sub Kegiatan
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 6 Sub Kegiatan
 - c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan 1 Sub Kegiatan
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 4 Sub Kegiatan
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 2 Sub Kegiatan
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang merupakan program dan kegiatan urusan di bidang perhubungan. Pada program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terdapat 11 kegiatan dan 14 Sub Kegiatan yaitu:
 - a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, dengan 1 Sub Kegiatan
 - b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan 1 Sub Kegiatan
 - c. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, dengan 1 Sub Kegiatan
 - f. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan 3 Sub Kegiatan
 - d. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota, dengan 2 Sub Kegiatan
 - e. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, dengan 1 Sub Kegiatan

- g. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan, dengan 1 Sub Kegiatan
- f. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 Sub Kegiatan
- g. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu) , dengan 1 Sub Kegiatan
- h. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, dengan 1 Sub Kegiatan
- i. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota, dengan 1 Sub Kegiatan

Tabel III. 2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	15	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	15	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
2	15	02	2.04	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	02	2.09	0001	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	02	2.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	02	2.10	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	02	2.11	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	02	2.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan dua sasaran strategis Dinas Perhubungan yang menjadi Indikator Kinerja Utama yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan dengan tiga Indikator Kinerja Utama yaitu : 1) Indeks Kelancaran Lalu Lintas, 2) Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan, dan 3) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP). Untuk mengetahui lebih jelas sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1 Rencana Target Kinerja IKU Kepala Daerah dan OPD

No	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan	1. Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,51
		2. Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	2,68
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	79,59

Indikator Kinerja Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Janga Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
Renstra Tahun 2021-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Tahun 2024
1	Persentase penurunan Angka Kecelakaan (%)	3%
2	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan yang berfungsi dengan baik (%)	70%
3	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)	94,5
4	Indeks Kelancaran Lalu Lintas (rasio)	0,51
5	Aspek penyebab kemacetan yang teratasi (titik)	64
6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	79,59
7	Persentase Realisasi Keuangan Dinas Perhubungan (%)	98,00
8	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86
9	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	4.400.000
10	Rasio ijin trayek (rasio)	2,96
11	Jumlah uji KIR angkutan umum	6162
12	Jumlah Terminal Penumpang dan Terminal Barang (Terminal Bis)	4
13	Persentase layanan angkutan darat (%)	0,01%
17	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	93%
15	Pemasangan Rambu-rambu (%)	62%
16	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,0155
17	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	4.400.000
18	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun (orang)	140.000
19	Rasio Konektivitas Kota	48
20	V/C Ratio di jalan Kota	0,51
21	Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 kendaraan	2,68

Perumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota yang tertuang dalam RPJMD.

Adapun mengenai uraian program dan kegiatan Dinas Pehubungan, target kinerja dan pagu indikatif program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2024 secara lengkap dapat dilihat pada tabel Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERHUBUNGAN KAB. LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERHUBUNGAN						12.919.376.741,00							35.400.858.775,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.919.376.741,00							35.400.858.775,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						12.919.376.741,00							35.400.858.775,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	12.087.459.091,00						-	18.430.458.775,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	-			0 %	0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	361.433.050,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		73.205.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		46.585.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		38.332.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		78.529.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		26.620.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		60.893.250,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		37.268.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	-			100 %	3.704.033.511,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	5.544.074.886,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/bulan	3.687.636.011,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		5.342.291.293,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	16.397.500,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		124.935.646,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		26.620.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		25.289.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		24.938.947,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	-			0 %	0,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	239.979.300,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		46.957.680,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		59.229.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		39.530.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		94.261.420,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi pendapatan daerah	-			0 %	0,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	108.560.619,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		25.431.417,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		2.079.421,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah														
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		1.030.860,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah</i>				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		1.361.746,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		78.657.175,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	-			0 %	0,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas	-	646.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				0 Paket	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun														
			<i>Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan</i>				0 Orang	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		2.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				0 Orang	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		644.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	421.756.400,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	545.740.480,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	10.050.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		4.525.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	17.259.700,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		13.310.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	83.065.600,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		121.646.745,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	62.087.100,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		84.386.731,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		8.091.016,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	49.250.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		109.807.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	200.044.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		203.973.088,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaa n</i>	-			100 %	28.500.000,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	789.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		149.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	28.500.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		190.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	7.519.240.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	9.274.394.690,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	2.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		6.655.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	6.661.500.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		8.784.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	8.240.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		25.062.730,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	847.500.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		458.076.960,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	-			100 %	413.929.180,00			-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	920.525.750,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	378.929.180,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		270.525.750,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	35.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Kelancaran Lalu Lintas Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	-			0,51 Indeks 2,68 Rasio	831.917.650,00						-	16.970.400.000,00	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pelaksanaan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabuupaten/ Kota	-			100 %	66.132.500,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	66.132.500,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<i>Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan yang berfungsi dengan baik</i>	-			70 %	126.400.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas	-	8.528.559.216,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun</i>				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		7.259.919.216,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				250 Unit	126.400.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		1.228.640.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase tercapainya dan tertib pengelolaan terminal	-			0 %	0,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas	-	1.645.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C														
			Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang</i>				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pembangun an infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembangun an Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		950.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C														
			<i>Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.</i>				0 Orang	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pembangun an infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembangun an Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			<i>Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara</i>				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pembangun an infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembangun an Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		595.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	<i>Persentase tercapainya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</i>	-			100 %	33.600.000,00			-	Meningkatk an pembangun an infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembangun an Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas	-	78.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	33.600.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		43.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan	-			95 %	179.980.200,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas	-	958.380.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	19.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Orang	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		243.480.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Dokumen	84.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		301.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		208.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara</i>				9 Unit	76.980.200,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		57.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0009	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		24.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		44.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/ Kota	-			100 %	261.950.800,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas	-	4.590.974.284,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	41.950.800,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		319.946.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		305.580.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				1 Laporan	220.000.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		3.965.448.284,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	-			100 %	30.268.000,00			-	Meningkatk an pembangun an infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas	-	253.623.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				1 Laporan	30.268.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pembangun an infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		129.438.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin														
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pembangun an infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		124.185.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang terlaksana	-			100 %	53.587.500,00			-	Meningkatk an pembangun an infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas	-	466.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal</i>				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	53.587.500,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		90.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum														
			<i>Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		115.950.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan														
			<i>Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya</i>				0 Orang	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				0 Laporan	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tertibnya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	-			0 %	0,00			-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas	-	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/k ota 1 (satu)	-			100 %	56.317.500,00			-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas	-	104.580.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.10.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	56.317.500,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		59.580.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksanannya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-			100	15.646.150,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas	-	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	15.646.150,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase terlaksana penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam satu daerah kabupaten/kota</i>	-			0 %	0,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas	-	93.083.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				0 Dokumen	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		93.083.500,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase tertibnya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota</i>	-			100 %	8.035.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas	-	171.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota															
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	8.035.000,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		21.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik															
			<i>Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>				0 Unit	0,00	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan Peningkata n Pembang unan Infrastuktur Daerah	Masyarakat dan Pengguna Lalu Lintas		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	J U M L A H							12.919.376.741,00							35.400.858.775,00		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 adalah Renja tahun keempat dari Rencana Strategis 2021-2026, Renja merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

Berkaitan dengan itu, menjamin terlaksananya program dan kegiatan Renja Tahun 2024 dengan baik, maka ditetapkan kaidah-kaidah, sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 merupakan pedoman dalam menyusun Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.
2. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 merupakan pedoman penyusunan RKA tahun 2024.
3. Seluruh aparatur di sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat tercapai.
4. Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, perlu dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan setiap triwulan dan semesteran
5. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dilaksanakan pada akhir tahun pelaksanaan Renja terhadap target indikator yang sudah ditetapkan.

Disamping kaidah yang dirumuskan, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Perhubungan. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Perhubungan, dengan cara memberi

dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Perhubungan dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2024, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2024 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.



BUPATI LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 905/333/BUP-LK/XII/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO***

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan huruf a diatas perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 103);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :
 - a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2023;
 - b. Melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2023 Perangkat Daerah seperti Forum Perangkat Daerah, dan rapat-rapat lainnya.
 - c. Menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2023, mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
 - a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - c. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - e. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - f. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan

pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.

KELIMA

- : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 20 Desember 2022



BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 905/333/BUP-LK/XII/2022
TANGGAL : 20 DESEMBER 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA
KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-
OFFICIO*

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	SEKRETARIAT DAERAH	
	Sekretaris Daerah	Ketua
	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
	Kabag Perencanaan Dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Pemerintahan	Anggota
	Kabag Hukum	Anggota
	Kabag Organisasi	Anggota
	Kabag Administrasi Pembangunan	Anggota
	Kabag Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kabag Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Anggota
	Kabag Kesejahteraan Rakyat	Anggota
	Kabag Umum	Anggota
	Kabag Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Pelaporan	Anggota
	Kasubag Protokol	Anggota
	Subkoordinator Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Subkoordinator Dokumentasi Pimpinan	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan Dan Anjab	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Anggota
	Subkoordinator Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	Anggota
	Subkoordinator Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Perlengkapan	Anggota
	Subkoordinator Rumah Tangga	Anggota
	Subkoordinator Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota
	Subkoordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Penyusunan Program	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Program	Anggota
	Subkoordinator Evaluasi Dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan BUMD Dan BLUD	Anggota
	Subkoordinator Perekonomian	Anggota
	Subkoordinator Sumber Daya Alam	Anggota
	Subkoordinator Peraturan Perundang-Undangan	Anggota
	Subkoordinator Bantuan Hukum	Anggota
	Subkoordinator Dokumentasi Dan Informasi	Anggota
	Subkoordinator Bina Mental Dan Spiritual	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Administrasi Pemerintahan Dan Kewilayahan	Anggota
	Subkoordinator Otonomi Daerah	Anggota
	Subkoordinator Kerjasama Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Daerah	Anggota
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Sekretaris DPRD	Ketua
	Kabag Umum dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
	Subkoordinator Fasilitas Penganggaran	Anggota
	Subkoordinator Program dan Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Kajian Perundang-Undangan	Anggota
	Subkoordinator Humas, Protokol, dan Publikasi	Anggota
	Subkoordinator Fasilitas Pengawasan	Anggota
	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Rumah Tangga	Anggota
	Subkoordinator Persidangan dan Risalah	Anggota
	Subkoordinator Kerjasama dan Aspirasi	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3.	INSPEKTORAT	
	Inspektur	Ketua
	Sekretariat	Sekretaris
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
	Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Perencanaan	Anggota
	Subkoordinator Analisis Dan Evaluasi	Anggota
	Kasubag Administrasi Umum Dan Keuangan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat	Anggota
	Pelaksana pada Inspektorat	Anggota
4.	DINAS KESEHATAN	
	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris 1
	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	Sekretaris 2
	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi, Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Aset	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Alat Kesehatan dan Fasyankes	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Kefarmasian dan Perizinan	Anggota
	Subkoordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
	Subkoordinator Surveilens, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan	Anggota
	Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
	Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Nafza	Anggota
	Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Anggota
	Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Haji, dan Jaminan Kesehatan	Anggota
	Subkoordinator Peningkatan Mutu dan Akreditasi, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Anggota
	Kabag Tata Usaha RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kabid Perencanaan Pelaporan Sarana Prasarana dan Logistik RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kabid Pelayanan Penunjang dan Promosi Kesehatan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Subkoordinator Sarana Prasarana Dan Logistik RSUD dr Achmad Darwis	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Perencanaan Dan Pelaporan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Penunjang Medis RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Penunjang Non Medis Dan Promosi Kesehatan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Medis RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Perawatan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kasubag Keuangan RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kasubag Umum dan Humas RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Kasubag Kepegawaian Dan Pengembangan SDM RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Anggota
	Pelaksana pada RSUD dr Achmad Darwis	Anggota
5.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Anggota
	Kabid Kebudayaan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Keuangan dan BMD	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Kurikulum dan Penilaian	Anggota
	Kasi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan dan Sarana Prasana	Anggota
	Kasi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Anggota
	Kasi Pendidikan Non Formal	Anggota
	Subkoordinator PTK PAUD dan PNF	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP	Anggota
	Subkoordinator Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
	Subkoordinator Sejarah dan Nilai Tradisi	Anggota
	Subkoordinator Kesenian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota
	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Bagian Program dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air	Anggota
	Subkoordinator Pelaksanaan Sumber Daya Air	Anggota
	Subkoordinator Operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan	Anggota
	Subkoordinator Preservasi Jalan dan Jembatan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan Jasa Konstruksi	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan dan Pemberdayaan	Anggota
	Subkoordinator Pemantauan Dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Tata Ruang	Anggota
	Subkoordinator Pemanfaatan dan pengendalian	Anggota
	Kasi Pertanahan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Anggota
	Subkoordinator Tata Bangunan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	Kepala Satpol PP	Ketua
	Sekretaris Satpol PP	Sekretaris
	Kepala Bidang Trantib	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kepala Bidang PPUD	Anggota
	Kepala Bidang SDA	Anggota
	Kasubag Program & Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Intelijen	Anggota
	Kasi Trantib & Pengamanan	Anggota
	Kasi Operasional & Logistik	Anggota
	Kasi Bina Potensi	Anggota
	Subkoordinator Data Informasi	Anggota
	Kasi Satlinmas dan Pengaduan Masyarakat	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kasi Penegakan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pengawasan & Penyuluhan	Anggota
	Kasi Pelatihan Dasar	Anggota
	Subkoordinator Teknis Fungsional	Anggota
	Kasi Tindak Internal	Anggota
	Pelaksana pada Satpol PP	Anggota
8.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Ketua
	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran	Sekretaris
	Kabid Pencegahan	Anggota
	Kabid Pemadam Dan Penyelamatan	Anggota
	Kabid Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan Dan Inspeksi	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Operasi Dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Pemadam Dan Investigasi	Anggota
	Kasi Penyelamatan Dan Evakuasi	Anggota
	Kasi Pengadaan Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana Prasarana	Anggota
	Subkoordinator Informasi Dan Pengelolaan Data	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
9.	DINAS SOSIAL	
	Kepala Dinas Sosial	Ketua
	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Anggota
	Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
	Subkoordinator Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Nafza dan Korban Perdagangan Orang	Anggota
	Subkoordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	Anggota
	Subkoordinator Jaminan Sosial Keluarga	Anggota
	Subkoordinator Identikasi dan Penguatan Kapasitas	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Identitas Penduduk	Anggota
	Subkoordinator Pindah Datang Penduduk	Anggota
	Subkoordinator Pendataan Penduduk	Anggota
	Subkoordinator Kelahiran	Anggota
	Subkoordinator Perkawinan dan Perceraian	Anggota
	Subkoordinator Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian	Anggota
	Subkoordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Subkoordinator Pengolahan dan Penyajian Data	Anggota
	Subkoordinator Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
	Subkoordinator Kerjasama	Anggota
	Subkoordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Anggota
	Subkoordinator Inovasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Kepala DPPKBPPPA	Ketua
	Sekretaris DPPKBPPPA	Sekretaris
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Penduduk	Anggota
	Subkoordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Subkoordinator Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
	Subkoordinator Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi	Anggota
	Subkoordinator Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Anggota
	Subkoordinator Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	Anggota
	Subkoordinator Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi	Anggota
	Subkoordinator Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan	Anggota
	Subkoordinator Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak	Anggota
	Subkoordinator Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak	Anggota
	Pelaksana pada DPPKBPPPA	Anggota
12.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Kepala DPMPTSP	Ketua
	Sekretaris DPMPTSP	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Terpadu	Anggota
	Kabid Promosi	Anggota
	Kabid Perencanaan dan Pengembangan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan dan BMD	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Perizinan Umum	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Perizinan Umum Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Promosi	Anggota
	Subkoordinator Sarana dan Prasarana Promosi	Anggota
	Subkoordinator Data dan Informasi	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan Potensi dan Peluang Investasi	Anggota
	Subkoordinator Penyuluhan Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Regulasi Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Pemantauan Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Penanaman Modal	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan Penanaman Modal	Anggota
	Pelaksana pada DPMPTSP	Anggota
13.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	
	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Ketua
	Sekretaris Perdagangan, Koperasi UKM	Sekretaris
	Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi & Usaha Mikro	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan dan perizinan	Anggota
	Subkoordinator Peningkatan kualitas SDM koperasi & kewirausahaan	Anggota
	Subkoordinator Metrologi	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Jaringan Perdagangan	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	Anggota
	Subkoordinator Sarana Distribusi dan Stabilitas Barang Pokok dan Penting	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan Perizinan dan Pendaftaran	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Anggota
	Subkoordinator Keanggotaan dan Penerapan Peraturan	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan Koperasi	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
14.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ketua
	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri	Anggota
	Kabid Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota
	Kabid Transmigrasi	Anggota
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Industri Agro	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Industri Non Agro	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industri	Anggota
	Subkoordinator Perizinan dan Data	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan teknologi Industri	Anggota
	Subkoordinator Promosi dan Pemasaran	Anggota
	Subkoordinator Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Anggota
	Subkoordinator Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
	Subkoordinator Perlindungan Tenaga Kerja	Anggota
	Subkoordinator Penempatan Transmigrasi	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
	Subkoordinator Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
15.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Kepala Diskominfo	Ketua
	Sekretaris Diskominfo	Sekretaris
	Kabid Komunikasi Publik	Anggota
	Kabid Aplikasi Informatika	Anggota
	Kabid Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kabid Persandian Dan Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	Anggota
	Subkoordinator Pengelola Media Komunikasi Publik	Anggota
	Subkoordinator Layanan Hubungan Media Dan Kehumasan	Anggota
	Subkoordinator Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Anggota
	Subkoordinator Aplikasi	Anggota
	Subkoordinator Statistik Sektor Ekonomi Dan Infastruktur	Anggota
	Subkoordinator Statistik Sektor Pemerintahan Dan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Subkoordinator Identifikasi Deteksi Dan Proteksi Keamanan SIBER	Anggota
	Subkoordinator Penanggulangan Pemulihan Pemantauan Dan Pengendalian	Anggota
	Subkoordinator Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Pelaksana pada Diskominfo	Anggota
16.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Ketua
	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Kabid Pariwisata	Anggota
	Subkoordinator Promosi dan Informasi	Anggota
	Subkoordinator Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Anggota
	Subkoordinator Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kabid Pemuda	Anggota
	Subkoordinator Peningkatan Kreatifitas Kewirausahaan Pemuda	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Kompetensi Pemuda	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Anggota
	Kabid Olahraga	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Olah Raga Pendidikan	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Olah Raga Prestasi	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan Tradisi	Anggota
	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM	Anggota
	Subkoordinator Sarana Prasarana Pariwisata	Anggota
	Subkoordinator Sarana Prasarana Pemuda Olah Raga	Anggota
	Subkoordinator Pendataan dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
17.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
	Kepala DPMD/N	Ketua
	Sekretaris DPMD/N	Sekretaris
	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG	Anggota
	Subkoordinator Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari	Anggota
	Subkoordinator Administrasi Produk Hukum Nagari dan Kerjasama antar Nagari	Anggota
	Subkoordinator Organisasi Pemerintahan Nagari	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan Keuangan Nagari	Anggota
	Subkoordinator Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari	Anggota
	Subkoordinator Aset dan Kekayaan Nagari	Anggota
	Pelaksana pada DPMD/N	Anggota
18.	DINAS PERHUBUNGAN	
	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris
	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Lalu Lintas	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	Anggota
	Kasi Pengujian Sarana	Anggota
	Kasi Angkutan	Anggota
	Kasi Pengoperasian Prasarana	Anggota
	Kasi Perawatan Prasarana	Anggota
	Subkoordinator Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Anggota
	Kasi Lingkungan Perhubungan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Keselamatan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
19.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN	
	Kepala DLHPP	Ketua
	Sekretaris DLHPP	Sekretaris
	Kabid Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Subkoordinator Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Subkoordinator Operasional Penanganan Sampah	Anggota
	Subkoordinator Pengelolaan Limbah dan Sampah	Anggota
	Subkoordinator Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
	Subkoordinator Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Subkoordinator Perumahan	Anggota
	Subkoordinator Kawasan Permukiman	Anggota
	Subkoordinator Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Anggota
	Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota
	Pelaksana pada DLHPP	Anggota
20.	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	Kepala Distanhorbun	Ketua
	Sekretaris Distanhorbun	Sekretaris
	Kabid Sarana	Anggota
	Kabid Prasarana	Anggota
	Kabid Perlindungan Tanaman Dan Perizinan Usaha	Anggota
	Kabid penyuluhan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Keuangan Dan Aset	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Pupuk Dan Pestisida	Anggota
	Subkoordinator Sumber Daya Genetik	Anggota
	Subkoordinator Alat Dan Mesin Pertanian	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Prasarana	Anggota
	Subkoordinator Irigasi	Anggota
	Subkoordinator Infrastruktur Pertanian	Anggota
	Subkoordinator Perlindungan Tanaman	Anggota
	Subkoordinator Penanganan Dampak Perubahan Iklim Dan Bencana Alam	Anggota
	Subkoordinator Perizinan Dan Pembinaan Usaha	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan	Anggota
	Subkoordinator Ketenagaan	Anggota
	Subkoordinator Penyelenggaraan Penyuluhan	Anggota
	Pelaksana pada Distanhorbun	Anggota
21.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
	Kabid Perbibitan dan Produksi	Anggota
	Kabid Keswan,Kesmavet,Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kabid. Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kabid Penyuluhan	Anggota
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Non Ruminansia	Anggota
	Subkoordinator Ruminansia	Anggota
	Subkoordinator Perbibitan	Anggota
	Subkoordinator Kesmavet	Anggota
	Subkoordinator Kesehatan Hewan	Anggota
	Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Subkoordinator Pakan	Anggota
	Subkoordinator Pembiayaan dan Investasi	Anggota
	Subkoordinator Lahan dan Irigasi	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan	Anggota
	Subkoordinator Metode dan Infomasi	Anggota
	Subkoordinator Ketenagaan	Anggota
	Pelaksana pada Disnakkeswan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
22.	DINAS PERIKANAN	
	Kepala Dinas Perikanan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perikanan	Sekretaris
	Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutfah	Anggota
	Subkoordinator Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian Mutu Pembudiyaan Ikan	Anggota
	Subkoordinator Sarana dan Prasarana Perikanan	Anggota
	Subkoordinator Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan	Anggota
	Subkoordinator Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan	Anggota
	Subkoordinator Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	Anggota
	Subkoordinator Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan	Anggota
	Subkoordinator Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perikanan	Anggota
23.	DINAS PANGAN	
	Kepala Dinas Pangan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pangan	Sekretaris
	Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
	Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Ketersediaan Pangan	Anggota
	Subkoordinator Distribusi dan Harga Pangan	Anggota
	Subkoordinator Kerawanan Pangan	Anggota
	Subkoordinator Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Pangan Lokal	Anggota
	Subkoordinator Keamanan Pangan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pangan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
24.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
	Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Promosi dan Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan TIK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Arsip Statis dan Layanan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Subkoordinator Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Fungsional Pustakawan	Anggota
	Fungsional Kearsipan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan	Anggota
25.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	Kepala Bapelitbang	Ketua
	Sekretaris Bapelitbang	Sekretaris
	Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Bapelitbang	Anggota
	Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Program Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Keuangan Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Pertanian dan Perikanan Bapelitbang	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Perindustrian, Perdagangan, UMK, Penanaman Modal dan Pariwisata Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Perencanaan dan Pendanaan Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Sosial Budaya Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Sumber Daya Manusia Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Infrastruktur Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Pengembangan Wilayah Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bapelitbang	Anggota
	Subkoordinator Data dan Informasi Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang	Anggota
	Pelaksana pada Bapelitbang	Anggota
26.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
	Kepala BKPSDM	Ketua
	Sekretaris BKPSDM	Sekretaris
	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Anggota
	Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial ASN	Anggota
	Subkoordinator Pendidikan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN	Anggota
	Subkoordinator Kepangkatan	Anggota
	Subkoordinator Mutasi	Anggota
	Subkoordinator Displin ASN	Anggota
	Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS	Anggota
	Subkoordinator Status ASN	Anggota
	Subkoordinator Informasi ASN	Anggota
	Subkoordinator Formasi dan Pengadaan ASN	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota
27.	BADAN KEUANGAN	
	Kepala Badan Keuangan	Ketua
	Sekretaris Badan Keuangan	Sekretaris
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Subkoordinator 2 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kabid Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Subkoordinator 1 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Subkoordinator 1 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Subkoordinator 2 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Subkoordinator 1 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Subkoordinator 2 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Badan Keuangan	Anggota
28.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Ketua
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
	Kabid Ideologi Dan Wasbang	Anggota
	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
	Kabid Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Subkoordinator Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Bina Ideologi	Anggota
	Subkoordinator Bina Wasbang	Anggota
	Subkoordinator Bintang, Eksosbud Dan Agama	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini	Anggota
	Subkoordinator HAL Dan Fasilitas Pemilu	Anggota
	Subkoordinator Fasilitas Parpol Dan Ormas	Anggota
	Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota
29.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
	Sekretaris BPBD	Sekretaris
	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Subkoordinator Pencegahan	Anggota
	Subkoordinator Kesiapsiagaan	Anggota
	Subkoordinator Kedaruratan	Anggota
	Subkoordinator Logistik	Anggota
	Subkoordinator Rehabilitasi	Anggota
	Subkoordinator Rekonstruksi	Anggota
	Pelaksana pada BPBD	Anggota
30.	KECAMATAN GUGUAK	
	Camat Guguk	Ketua
	Sekretaris Camat Guguk	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Guguk	Anggota
31.	KECAMATAN PAYAKUMBUH	
	Camat Payakumbuh	Ketua
	Sekretaris Camat Payakumbuh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh	Anggota
32.	KECAMATAN MUNGKA	
	Camat Mungka	Ketua
	Sekretaris Camat Mungka	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Mungka	Anggota
33.	KECAMATAN SULIKI	
	Camat Suliki	Ketua
	Sekretaris Camat Suliki	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Suliki	Anggota
34.	KECAMATAN BUKIK BARISAN	
	Camat Bukik Barisan	Ketua
	Sekretaris Camat Bukik Barisan	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
35.	KECAMATAN GUNUANG OMEH	
	Camat Gunuang Omeh	Ketua
	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
36.	KECAMATAN LUAK	
	Camat Luak	Ketua
	Sekretaris Camat Luak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Luak	Anggota
37.	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
	Camat Lareh Sago Halaban	Ketua
	Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Lareh Sago Halaban	Anggota
38.	KECAMATAN HARAU	
	Camat Harau	Ketua
	Sekretaris Camat Harau	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Harau	Anggota
39.	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
	Camat Situjuah Limo Nagari	Ketua
	Sekretaris Camat Situjuah Limo Nagari	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Anggota
40.	KECAMATAN AKABILURU	
	Camat Akabiluru	Ketua
	Sekretaris Camat Akabiluru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru	Anggota
41.	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
	Camat Pangkalan Koto Baru	Ketua
	Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Anggota
42.	KECAMATAN KAPUR IX	
	Camat Kapur IX	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IX	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota
	Subkoordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Subkoordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Subkoordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 20 Desember 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO